

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kesbangpol provinsi berkoordinasi dengan Kesbangpol kabupaten/kota serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yaitu forum yang bertugas menjangkau dan mengkomunikasikan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM berperan sebagai ujung tombak pemantauan situasi di lapangan yang melaporkan kondisi daerah secara berjenjang hingga ke Kesbangpol provinsi sebagai bahan pengambilan kebijakan. Efektivitas fungsi deteksi dini ini sangat bergantung pada ketersediaan data dan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang terlibat.

Konflik sosial merupakan perseteruan antarkelompok masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas wilayah dan menghambat pembangunan nasional (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Di Indonesia, konflik sosial kerap dipicu oleh berbagai faktor mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sengketa sumber daya alam, batas wilayah, hingga dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 93,9% peristiwa konflik sosial di Indonesia bersumber dari permasalahan politik, ekonomi, dan sosial budaya, dengan jumlah kejadian yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat sepanjang 2019 hingga 2025 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa sistem pemantauan konflik yang terintegrasi semakin mendesak untuk diwujudkan. Namun, proses pelaporan potensi konflik dari kabupaten/kota yang masih mengandalkan mekanisme informal menyebabkan data tersebar, sulit direkap secara konsisten, dan riwayat penanganan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga

memperlemah fungsi pengawasan dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi konflik yang membutuhkan penanganan prioritas (Saripudin et al., 2020; Kusuma & Mardiana, 2023). Di sisi lain, pelaporan situasi daerah sebagai bahan kewaspadaan dini juga belum berjalan optimal; implementasi mekanisme pelaporan oleh FKDM masih menghadapi kendala mulai dari belum adanya standar operasi yang jelas hingga keterbatasan dukungan yang menghambat pelaksanaan pemantauan secara konsisten (Janur, 2024). Padahal, Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 telah mengamankan mekanisme pelaporan secara berjenjang melalui sistem kewaspadaan dini, dan Kemendagri bahkan telah membentuk Tim Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) beserta sistem pelaporannya sebagai sarana pelaporan situasi daerah dari tingkat provinsi ke pusat, sementara pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi belum terakomodasi dalam sistem tersebut (Permendagri Nomor 46 Tahun 2019). Ketiadaan visualisasi data yang memadai turut menyulitkan pengambil keputusan dalam memahami sebaran dan tingkat kerawanan konflik di suatu wilayah secara cepat dan menyeluruh (Saripudin et al., 2020; Kusuma & Mardiana, 2023).

Di Provinsi Sumatera Barat, kondisi ini dirasakan secara nyata. Kesbangpol Provinsi mencatat bahwa konflik sosial terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun dengan fluktuasi yang signifikan 35 kasus pada 2020, 96 kasus pada 2021, 96 kasus pada 2022, 85 kasus pada 2023, dan 54 kasus pada 2024 (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat, 2024). Konflik-konflik ini mencakup sengketa tanah ulayat, konflik batas wilayah antarnagari, hingga dinamika sosial yang kerap memanas menjelang momentum politik seperti Pemilu dan Pilkada. Laporan situasi daerah dari FKDM dan laporan potensi konflik dari Kesbangpol kabupaten/kota selama ini masih disampaikan melalui WhatsApp dan Google Form tanpa format baku, sehingga data tersebar di berbagai media, menyulitkan perekapan, serta menghambat penelusuran riwayat laporan secara konsisten. Untuk kebutuhan rekap berkala setiap empat bulan, kabupaten/kota pun masih mengandalkan WhatsApp, sehingga pengelolaan data secara terpusat sulit diwujudkan dan tidak tersedia visualisasi yang memadai sebagai bahan analisis pengambilan keputusan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat, 2024). Kondisi ini semakin diperparah dengan terhentinya operasional Sistem

Informasi Terpadu Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (Sitimdu) sejak tahun 2023, yang sebelumnya digunakan sebagai sarana pelaporan dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota. Sistem tersebut dihentikan karena teknologinya sudah usang, pengembang awalnya tidak lagi bekerja di instansi tersebut, serta tidak adanya dokumentasi sistem yang memadai untuk mendukung pengembangan lebih lanjut, sehingga seluruh proses pelaporan kembali dilakukan secara informal tanpa pencatatan yang terstruktur (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat, 2024).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan dan pemantauan konflik sosial. Sariipudin (2020) mengembangkan sistem informasi berbasis web yang bertujuan memudahkan pencatatan dan pemantauan potensi konflik di tingkat kecamatan, namun cakupannya terbatas pada satu kecamatan tanpa dukungan visualisasi peta. Kusuma dan Mardiana (2023) membangun Sistem Informasi Peta Konflik (SIPELIK) di Provinsi Bali yang bertujuan mendukung pemantauan konflik secara *real-time* dengan fitur pemetaan digital, namun sistem tersebut belum mengakomodasi alur pelaporan berjenjang antar instansi pemerintah. Nugroho (2023) mengkaji implementasi sistem *e-Government* Sidasiscam milik Kesbangpol Yogyakarta yang bertujuan menghubungkan operator kecamatan dengan pemerintah provinsi dalam pelaporan potensi konflik, namun sistem tersebut hanya mencakup satu jenis laporan dan tidak dilengkapi fitur pemetaan geografis. Hendri (2019) mengembangkan aplikasi yang bertujuan memetakan wilayah rawan konflik di Indonesia secara visual dan akurat berbasis GIS, namun tidak memiliki mekanisme pelaporan dari lapangan secara *real-time*. Nasution (2025) merancang sistem pengaduan masyarakat berbasis web di Kesbangpol Tebing Tinggi untuk menggantikan proses manual yang tidak efisien, namun sistem yang dirancang hanya melayani pengaduan satu arah dari masyarakat umum tanpa alur verifikasi multilevel antar instansi dan tanpa fitur pemetaan. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut, terdapat kesenjangan yang belum terpenuhi, yaitu belum adanya sistem yang mengintegrasikan pelaporan situasi daerah dan potensi konflik secara berjenjang antar instansi pemerintah sekaligus dilengkapi fitur pemetaan geografis berbasis *geotagging*.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, dibangun sistem informasi yang mengintegrasikan pelaporan situasi daerah oleh FKDM dan *monitoring* potensi konflik oleh Kesbangpol kabupaten/kota dalam satu *platform* dengan alur verifikasi berjenjang antar instansi serta dilengkapi fitur visualisasi persebaran data berbasis *geotagging*. Metode Waterfall dipilih sebagai pendekatan pengembangan karena sesuai untuk sistem dengan kebutuhan yang sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal; sebagaimana dinyatakan oleh Sommerville (2020) bahwa Waterfall merupakan pendekatan berbasis perencanaan yang cocok diterapkan ketika kebutuhan sistem stabil dan tidak banyak berubah selama proses pengembangan berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Pembangunan Sistem Informasi Pelaporan Situasi Daerah dan *Monitoring* Potensi Konflik Berbasis Web di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat". Sistem yang telah dibangun dan diuji ini mampu meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan laporan, mempermudah akses informasi bagi Kesbangpol provinsi maupun kabupaten/kota, serta mempercepat koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana membangun Sistem Informasi Pelaporan Situasi Daerah dan *Monitoring* Potensi Konflik Berbasis Web di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat?"

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini, yaitu :

1. Sistem hanya membahas pengelolaan laporan situasi daerah dan laporan potensi konflik, mulai dari proses *input* oleh FKDM dan Kesbangpol kabupaten/kota, persetujuan Kepala Kesbangpol kabupaten/kota, validasi admin provinsi, hingga pencatatan status tindak lanjut laporan potensi konflik, dan melihat persebaran data.
2. Sistem dibuat berbasis web dan hanya dapat digunakan melalui web browser.
3. Pembangunan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall sampai tahap

pengujian (*Integration and System Testing*).

4. Sistem digunakan oleh Admin Kesbangpol Provinsi, FKDM daerah, Kepala Kesbangpol kabupaten/kota dan Operator Kesbangpol kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah membangun Sistem Informasi Pelaporan Situasi Daerah dan *Monitoring* Potensi Konflik Berbasis Web di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat yang mengintegrasikan alur pelaporan berjenjang antar instansi, pencatatan tindak lanjut laporan, dan visualisasi persebaran data berbasis *geotagging* dalam satu *platform* terpusat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pencatatan dan pengelolaan laporan situasi daerah serta potensi konflik secara terstruktur, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses validasi di tingkat provinsi.
2. Mendukung fungsi *monitoring* melalui notifikasi *real-time* kepada Admin Kesbangpol Provinsi setiap kali laporan baru masuk ke sistem, sehingga provinsi dapat segera mengetahui perkembangan situasi di daerah dan koordinasi penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3. Memperkuat koordinasi antara FKDM, Kesbangpol kabupaten/kota, dan Kesbangpol provinsi karena informasi tersimpan dalam satu sistem terpusat dan mudah ditelusuri.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terbagi menjadi 6 bab, sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teori dan informasi pendukung yang akan digunakan dalam penelitian.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang objek penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem informasi.

## **BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, serta perancangan sistem yang mencakup desain arsitektur, alur kerja, basis data, dan antarmuka pengguna.

## **BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**

Bab ini berisi implementasi dari sistem informasi dalam bentuk codingan serta pengujian terhadap sistem yang sudah diimplementasikan.

## **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan pada Sistem Informasi Pelaporan Situasi Daerah dan *Monitoring* Potensi Konflik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat.

